

Judul : Presiden Mestinya Turun Tangan Meredakan
Tanggal : Senin, 03 Juli 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

Presiden Mestinya Turun Tangan Meredakan

DOK PRIBADI

Muradi

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad

Etiskah penolakan DPR (Komisi VD) terhadap Menteri BUMN selama 2 tahun ini?

Secara etika yang baik, DPR tidak cukup etis melakukan penolakan. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno itu lebih pada soal kepanjangan tangan dari program Presiden. Penolakan itu juga secara implisit ialah penolakan kepada Presiden dan itu yang tidak boleh.

Bagaimana kedua institusi meredakan persoalan?

Perlu mediasi. Katakanlah politik, kan memang tetap pada seninya, yakni masing-masing bisa saling memberikan apa yang menjadi kepentingannya dan di situ ada titik temu. Sebaiknya langkah yang bersifat tidak cukup etis bisa dikurangi agar tensi bangsa ini dapat lebih fokus untuk pembangunan. Tujuannya supaya memperlancar program-program eksekutif dalam merealisasikan janji politiknya.

Ada dugaan polemik itu dipengaruhi ego sektoral dari salah satu partai politik?

Kalau kemudian ini terkesan ada yang 'menunggangi' sebagai kepentingan berpolitik, misalnya PDIP tidak menganggap Rini, tapi itu justru bisa pula ditunggangi oleh orang-orang yang tidak mendapat akses yang sama ke Kementerian BUMN. Ini memang perlu juga untuk bisa cair. Kalau terus dihambat, itu sama saja menghambat program Presiden.

Apakah tepat mempertahankan Rini?

Sesuai UU Kementerian Negara, menteri adalah pembantu Presiden. Artinya, diganti atau tidak itu hak prerogatif Presiden. Prosesnya jelas, yakni mempertimbangkan efektivitas kerja. Apalagi jika Presiden menganggap, misalnya, sampai hari ini kinerja Kementerian BUMN masih baik, ya pasti tetap (Rini) dipertahankan.

Apa yang mestinya dilakukan Presiden?

Presiden bisa saja turun tangan. Ada dua bentuk. Pertama, formal, yaitu sebagai kepala negara maka Presiden bisa membangun komunikasi dengan pimpinan DPR. Kedua, informal, seperti membangun komunikasi politik yang tertutup. Kedua cara itu boleh dikerjakan Presiden secara langsung dan tidak langsung. (Gol/P-4)